

Analisis Konflik Yurisdiksi Antara Fifa dan Cas dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemain Sepak Bola Internasional

Rizky Abdullah Maulana*, Dievla Yunda Asadel, Hillal Rama Octavianto, Uno Fathih Mulia, Muhammad Ryan Permata Zen, Muhammad Fadhoil Bagus Perdana

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: c100230184@student.ums.ac.id*, c100230174@student.ums.ac.id,
c100230395@student.ums.ac.id, c100230158@student.ums.ac.id,
c100230287@student.ums.ac.id, c100230280@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Globalisasi sepak bola profesional telah memperluas kompleksitas hubungan hukum lintas negara, khususnya dalam sengketa kontrak pemain internasional yang melibatkan perbedaan sistem hukum nasional dan rezim hukum olahraga transnasional. Dalam konteks ini, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dan Court of Arbitration for Sport (CAS) berperan sebagai forum utama penyelesaian sengketa melalui kerangka *lex sportiva*. Namun, praktik penyelesaian sengketa tersebut sering memunculkan konflik yurisdiksi, terutama ketika putusan FIFA atau CAS berbenturan dengan prinsip hukum publik nasional, hak asasi manusia, dan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yurisdiksi yang digunakan oleh FIFA dan CAS dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain sepak bola internasional serta merumuskan model sinkronisasi yurisdiksi yang ideal untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis terhadap regulasi FIFA, CAS Code, serta putusan arbitrase dan yurisprudensi pengadilan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi FIFA dan CAS bersumber dari norma privat transnasional yang sah secara kontraktual, namun tidak bersifat absolut karena tetap tunduk pada pengawasan terbatas oleh hukum nasional dan supranasional. Oleh karena itu, diperlukan model sinkronisasi berbasis prinsip komplementaritas antara *lex sportiva* dan hukum publik guna menjaga keseimbangan antara otonomi olahraga dan supremasi hukum.

Kata kunci: konflik yurisdiksi; *lex sportiva*; arbitrase olahraga; sengketa kontrak pemain; hukum perdata internasional

ABSTRACT

*The globalization of professional football has intensified the complexity of cross-border legal relations, particularly in international player contract disputes involving divergent national legal systems and transnational sports law regimes. In this context, the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and the Court of Arbitration for Sport (CAS) function as the primary dispute resolution forums under the framework of *lex sportiva*. However, dispute resolution practices frequently give rise to jurisdictional conflicts, especially when FIFA or CAS decisions collide with national public law principles, human rights protection, and labor law standards. This study aims to examine the jurisdictional foundations applied by FIFA and CAS in resolving international football player contract disputes and to formulate an ideal model of jurisdictional synchronization to ensure legal certainty and justice for the parties involved. This research employs a normative juridical method using statutory, case-based, and conceptual approaches through an analysis of FIFA regulations, the CAS Code, and relevant arbitral awards and national court jurisprudence. The findings indicate that FIFA and CAS jurisdiction is grounded in transnational private norms that are contractually legitimate but not absolute, as they remain subject to limited judicial oversight under national and supranational legal systems. Accordingly, a synchronization model based on the principle of complementarity between *lex sportiva* and public law is essential to balance sporting autonomy with the rule of law.*

Keywords: *jurisdictional conflict; *lex sportiva*; sports arbitration; player contract disputes; private international law*

PENDAHULUAN

Globalisasi industri olahraga modern, terutama sepak bola profesional, telah menciptakan jaringan kompleks hubungan hukum lintas negara yang berdampak signifikan terhadap dinamika hukum perdata internasional. Perpindahan pemain antarnegara, investasi lintas yurisdiksi, dan kontrak sponsorship multinasional menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip dasar *lex loci contractus* dan *autonomy of will* dalam penentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks sepak bola profesional, kontrak antara pemain dan klub sering kali melibatkan perbedaan sistem hukum nasional, bahasa hukum, serta peraturan federasi internasional, yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata transnasional terkait pelanggaran klausul kontrak atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak (Ghorbani Asiabar et al., 2025).

Fenomena ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan kompleksitas sengketa kontrak pemain internasional. Berdasarkan laporan FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC), pada tahun 2022 saja terdapat lebih dari 350 kasus sengketa kontraktual yang diajukan, dengan mayoritas melibatkan pemain dari liga-liga Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Sementara itu, Court of Arbitration for Sport (CAS) mencatat rata-rata 50-70 kasus banding per tahun yang berkaitan dengan sengketa transfer dan kontrak pemain sepak bola. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% melibatkan konflik yurisdiksi antara putusan FIFA dan hukum nasional, terutama terkait kompensasi pemutusan kontrak, larangan bermain, dan sanksi finansial. Data ini memperlihatkan bahwa konflik yurisdiksi bukan sekadar masalah teoretis, melainkan tantangan struktural yang berdampak langsung pada kepastian hukum pemain, klub, dan federasi nasional.

Dalam menghadapi fenomena ini, lembaga seperti *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) dan Court of Arbitration for Sport (CAS) memainkan peran sentral sebagai forum penyelesaian sengketa utama. Namun, di balik fungsinya sebagai penjaga integritas olahraga, kedua lembaga tersebut kerap menghadapi konflik yurisdiksi. FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC), misalnya, sering menangani perkara ketenagakerjaan dan transfer pemain, sedangkan CAS berfungsi sebagai lembaga arbitrase banding tertinggi di bawah prinsip *lex sportiva* (lat. “hukum olahraga”). Ketegangan muncul ketika putusan FIFA digugat atau dibatalkan di CAS, menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai *choice of law* dan *choice of forum* (Flanagan, 2018).

Sejumlah studi akademik telah mengeksplorasi dimensi hukum konflik yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa olahraga internasional dengan penekanan yang beragam. Casini (2011) berpendapat bahwa CAS telah membangun suatu sistem normatif transnasional yang koheren dan independen dari hukum nasional, atau *lex sportiva* sebagai *jurisprudence constante*, meskipun pandangan ini dikritik karena dianggap terlalu idealis dan mengabaikan ketergantungan struktural CAS pada pengadilan nasional dalam eksekusi putusan. Di sisi lain, Duval (2018) mengambil posisi lebih kritis dengan menyatakan bahwa *lex sportiva* bukan sistem hukum otonom melainkan mekanisme governance privat yang legitimasinya bergantung pada toleransi negara, sehingga menekankan batasan otonomi olahraga oleh prinsip hukum publik seperti hak asasi manusia, meski kurang menawarkan solusi harmonisasi yang konkret. Sementara itu, Foster (2011) menganalisis *lex sportiva* sebagai hybrid legal order yang

menggabungkan elemen kontraktual dan quasi-yudisial, dengan legitimasi yang bersumber pada efektivitas penyelesaian sengketa secara cepat dan seragam, meskipun ia juga mengakui kerentanan sistem ini terhadap isu transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian lain turut memperkaya perspektif mengenai kompleksitas ini. Lindholm (2019) melalui analisis empiris terhadap putusan-putusan CAS menemukan inkonsistensi signifikan dalam penerapan prinsip hukum, terutama saat berhadapan dengan hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, serta mengkritik kurangnya transparansi dan tingginya biaya yang membatasi akses bagi pemain dari negara berkembang. Studi terbaru dari Ghorbani Asiabar et al. (2025) mengidentifikasi bahwa konflik yurisdiksi semakin kompleks akibat globalisasi pasar transfer dan klausul kontrak yang tidak selaras dengan sistem hukum nasional, di mana banyak pemain dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin menghadapi kesulitan menegakkan hak mereka karena ketidaksesuaian antara putusan FIFA/CAS dan hukum domestik.

Dari tinjauan tersebut, tampak bahwa meskipun diskusi mengenai legitimasi dan efektivitas *lex sportiva* telah banyak dilakukan, masih terdapat *research gap* yang signifikan. Pertama, belum ada kajian komprehensif yang secara sistematis menganalisis mekanisme konflik yurisdiksi antara FIFA/CAS dan pengadilan nasional dari perspektif hukum perdata internasional dengan menggunakan kerangka *hybrid legal order*. Kedua, studi-studi sebelumnya cenderung fokus pada yurisprudensi Eropa dan Swiss, sehingga pengalaman negara-negara di luar Eropa kurang tereksplorasi. Ketiga, belum ada model sinkronisasi yurisdiksi yang secara konkret merumuskan prinsip komplementaritas antara *lex sportiva* dan hukum publik nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, yang menjadi celah yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

Permasalahan ini memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara *lex sportiva* dengan prinsip hukum perdata internasional, di mana otonomi lembaga olahraga internasional sering kali berbenturan dengan kedaulatan hukum nasional. Misalnya, dalam kasus *Matuzalem v. FIFA* (CAS 2008/A/1519), Mahkamah Federal Swiss menyoroti bahwa penerapan sanksi FIFA dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan ekonomi pemain. Dengan demikian, diperlukan model normatif baru yang mampu menyelaraskan independensi lembaga arbitrase olahraga dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional publik dan privat, termasuk pengakuan terhadap *due process* dan *access to justice*.

Dari perspektif Hukum Perdata Internasional (*choice of law* dan yurisdiksi), konflik semacam ini menimbulkan beberapa masalah teoretis dan praktis: pertama, apakah para pihak dapat secara efektif memilih (*lex sportive*) atau forum arbitral sehingga mengesampingkan yurisdiksi nasional; kedua, bagaimana pengadilan nasional merespons putusan CAS (pengakuan/eksekusi dan kontrol atas *public policy* atau *EU law*); dan ketiga, bagaimana prinsip-prinsip seperti *autonomy of the parties*, *forum non conveniens*, dan pengakuan putusan arbitrase (mis. *New York Convention* untuk putusan arbitrase komersial, meskipun CAS berada dalam ranah olahraga khusus) diaplikasikan saat putusan CAS bertentangan dengan aturan nasional atau prinsip hukum publik negara anggota. Perkembangan yurisprudensi terbaru bahkan menunjukkan kecenderungan pengadilan-pengadilan nasional/pengadilan

supranasional untuk melakukan review lebih mendalam terhadap keputusan badan-badan olahraga bila ada benturan dengan hukum nasional atau EU law sebuah perkembangan yang relevan untuk analisis konflik yurisdiksi dalam konteks sepak bola internasional.

Secara konseptual, model penyelesaian sengketa ideal seharusnya menggabungkan pendekatan multi-tiered dispute resolution, di mana negosiasi, mediasi, dan arbitrase ditempatkan secara berjenjang sesuai dengan kompleksitas sengketa. Reformasi ini juga harus memperhatikan akses yang setara terhadap keadilan bagi pihak non-elite, seperti pemain dari negara berkembang yang sering kali mengalami keterbatasan dalam menghadapi federasi besar (Longa, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak praktis ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain internasional, yang pertama, dari sisi mobilitas pemain, menyebabkan keterlambatan penyelesaian sengketa yang berdampak negatif pada karir, terutama bagi pemain dengan kontrak pendek atau pemain muda, sebagaimana terlihat dalam kasus *Webster v. Heart of Midlothian* (CAS 2007/A/1298) yang menunjukkan bagaimana ketidakpastian kompensasi pemutusan kontrak dapat membatasi kebebasan ekonomi mereka; kedua, dari perspektif klub, konflik yurisdiksi menimbulkan risiko finansial signifikan karena ketidakpastian kompensasi akibat perbedaan interpretasi antara FIFA, CAS, dan pengadilan nasional, sehingga menghambat perencanaan keuangan jangka panjang dan mengurangi kepercayaan investor, khususnya di negara berkembang; ketiga, dari sisi integritas kompetisi, ketidakpastian ini memicu forum shopping yang dapat merusak konsistensi dan keadilan penerapan aturan global serta mengancam stabilitas sistem *lex sportiva*; dan keempat, urgensi ini semakin diperkuat oleh perkembangan hukum supranasional, terutama di Uni Eropa, di mana Court of Justice of the European Union (CJEU) semakin aktif melakukan judicial review terhadap aturan FIFA/UEFA yang dianggap bertentangan dengan kebebasan bergerak pekerja dan hukum persaingan, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus *Bosman* (1995), *Meca-Medina* (2006), dan *Super League case* (2023) yang membuktikan bahwa otonomi olahraga tidak lagi absolut dan harus diselaraskan dengan prinsip hukum publik Eropa, sehingga penelitian ini mendesak untuk memberikan kerangka normatif yang jelas bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola konflik yurisdiksi secara adil, transparan, dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting karena mengkaji bagaimana konflik yurisdiksi antara FIFA dan CAS beroperasi dalam praktik, faktor-faktor yang memicu forum dispute, serta dampaknya terhadap kepastian hukum para pihak (pemain, klub, dan agen). Dengan fokus pada kasus-kasus konkret dan doktrin Hukum Perdata Internasional, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif untuk memperjelas klausul forum dalam kontrak pemain internasional dan untuk memperbaiki harmonisasi antara aturan privat transnasional (*lex sportiva*) dan sistem hukum nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua isu utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini mengkaji dasar yurisdiksi yang digunakan oleh Fédération Internationale de Football Association (FIFA) dan Court of Arbitration for Sport (CAS) dalam menyelesaikan sengketa kontrak pemain sepak bola internasional, khususnya yang bersumber dari penerapan *lex sportiva*, prinsip otonomi olahraga, serta kesepakatan para pihak dalam

kontrak. Kedua, penelitian ini menganalisis model sinkronisasi yurisdiksi yang ideal antara mekanisme penyelesaian sengketa FIFA/CAS dan sistem hukum nasional guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak-hak para pihak, serta keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain sepak bola internasional.

Penelitian ini memberikan manfaat akademis, praktis, dan kebijakan yang signifikan. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hukum olahraga transnasional dan hukum perdata internasional, khususnya dalam konteks konflik yurisdiksi dan interaksi antara norma privat transnasional dengan hukum publik nasional. Penelitian ini juga memberikan kerangka teoretis baru berupa hybrid legal order yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena serupa di bidang governance transnasional lainnya, seperti arbitrase komersial internasional, hukum investasi, dan dispute resolution dalam organisasi internasional non-pemerintah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi pemain, klub, agen, dan federasi nasional dalam menyusun kontrak yang lebih jelas dan komprehensif terkait klausul yurisdiksi dan choice of law. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi advokat dan arbiter yang menangani sengketa sepak bola internasional untuk memahami batas-batas otonomi lex sportiva dan kapan intervensi pengadilan nasional dapat dibenarkan secara hukum.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan masukan kepada FIFA, CAS, dan asosiasi sepak bola nasional untuk mereformasi regulasi dan prosedur penyelesaian sengketa agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Rekomendasi konkret yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup: (1) standardisasi klausul yurisdiksi dalam kontrak pemain internasional; (2) pembentukan mekanisme koordinasi antara FIFA/CAS dan pengadilan nasional untuk mencegah forum shopping; (3) penguatan akses keadilan bagi pemain dari negara berkembang melalui pembebasan atau pengurangan biaya arbitrase; serta (4) peningkatan transparansi putusan CAS melalui publikasi jurisprudence yang lebih sistematis.

Implikasi yang lebih luas dari penelitian ini adalah kontribusinya terhadap debat global tentang keseimbangan antara otonomi organisasi transnasional dan supremasi hukum nasional. Dalam era globalisasi, banyak sektor—tidak hanya olahraga—menghadapi tantangan serupa dalam mengelola konflik antara norma privat global dan hukum publik domestik. Model sinkronisasi berbasis komplementaritas yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi untuk sektor-sektor lain yang menghadapi dilema governance serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa kontrak pemain sepak bola internasional, khususnya dalam konteks konflik yurisdiksi antara FIFA dan CAS. Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma tertulis (law in books) yang berlaku dan diinterpretasikan berdasarkan asas serta doktrin hukum yang relevan (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji instrumen hukum yang menjadi dasar yurisdiksi FIFA dan CAS, seperti FIFA Statutes, Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), serta Code of Sports-related Arbitration (CAS Code). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan arbitrase penting, antara lain Matuzalém v. FIFA (CAS 2008/A/1519 & 1520) dan De Sanctis v. Real Zaragoza SAD & FIFA (CAS 2012/A/3031), guna memahami bagaimana penerapan asas yurisdiksi dan prinsip pengakuan putusan arbitrase internasional dijalankan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri dan mengembangkan konsep *lex sportiva*, *autonomy of sport*, serta prinsip *party autonomy* dan *due process of law* dalam konteks hukum perdata internasional modern (Duval, 2018).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. **Bahan hukum primer**, meliputi:
 - a. FIFA Statutes (Edisi 2023)
 - b. Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)
 - c. Code of Sports-related Arbitration (CAS Code, 2023 Edition)
 - d. Putusan arbitrase CAS dan yurisprudensi pengadilan yang relevan
2. **Bahan hukum sekunder**, berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah seperti:
 - a. Casini, L. (2011). The Making of a Lex Sportiva: The Court of Arbitration for Sport Jurisprudence. *German Law Journal*, 12(5), 1317–1340.
 - b. Duval, A. (2018). Lex Sportiva: A Playground for Transnational Law. *European Journal of Legal Studies*, 10(1), 5–25.
 - c. Blackshaw, I. (2011). Sport, Mediation and Arbitration: Ensuring Fair Play in Sport Disputes. *International Sports Law Journal*, 2011(1–2), 13–25.
 - d. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
3. **Bahan hukum tersier**, berupa kamus hukum internasional, ensiklopedia hukum olahraga, serta sumber daring seperti situs resmi FIFA dan CAS.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen resmi, literatur akademik, dan jurnal open-access dari basis data seperti SSRN, ResearchGate, dan DOAJ.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif dan analisis kualitatif. Metode deskriptif-komparatif digunakan untuk menjelaskan isi norma dan membandingkan mekanisme yurisdiksi FIFA dan CAS dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain internasional. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip otonomi lembaga olahraga internasional dan kedaulatan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman sistematis mengenai bagaimana asas dan teori Hukum Perdata Internasional seperti *lex fori*, *party autonomy*, dan *recognition of foreign arbitral awards* berperan dalam mengurai konflik yurisdiksi serta membangun model harmonisasi hukum yang ideal antara FIFA, CAS, dan sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Yurisdiksi Yang Digunakan Oleh FIFA Dan CAS Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Pemain Sepak Bola Internasional

Meskipun kajian mengenai yurisdiksi FIFA dan CAS lazim disusun dengan menekankan sifat normatif *lex sportiva*, pendekatan tersebut sering kali hanya menggambarkan struktur formal tanpa melihat ketimpangan substantif yang muncul dalam praktik. Dalam konteks globalisasi sepak bola, konflik yurisdiksi tidak hanya lahir dari perbedaan forum penyelesaian sengketa, tetapi juga dari ketidakseimbangan kekuasaan antara federasi internasional, klub, dan pemain sebagai pihak yang ekonominya sering lebih lemah. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini tidak lagi bergantung pada deskripsi peraturan, melainkan mengurai benturan nyata antara norma privat transnasional dan hukum nasional, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami sejauh mana otonomi FIFA benar-benar berjalan dan di mana batasannya ketika berhadapan dengan prinsip keadilan publik.

FIFA, sebagai badan pengatur global sepak bola, mendasarkan yurisdiksinya dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain pada norma-norma yang tertuang dalam FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), Statutes of FIFA, serta Disciplinary and Ethics Codes yang secara kolektif membentuk *lex sportiva* sistem hukum otonom dalam dunia olahraga. RSTP menetapkan aturan mengenai status pemain, transfer, pendaftaran, serta kewajiban klub dan pemain dalam hubungan kontraktual. Melalui sistem ini, FIFA berperan sebagai transnational private regulator yang tidak tunduk langsung pada satu sistem hukum nasional, melainkan menciptakan norma-norma privat yang berlaku secara global bagi asosiasi anggota, klub, dan pemain Yilmaz, (2018). Menurut (Duval, 2018), sistem ini merupakan bentuk private transnational governance, di mana organisasi olahraga internasional memiliki regulatory authority atas anggotanya melalui mekanisme keanggotaan dan kepatuhan kontraktual. Dengan demikian, legitimasi yurisdiksi FIFA bersumber dari prinsip *autonomy of sport* dan *consent of the parties*, di mana semua pihak yang berpartisipasi dalam sistem sepak bola internasional menerima peraturan FIFA sebagai syarat keanggotaan.

Secara yuridis, dasar yurisdiksi FIFA memperkuat prinsip otonomi organisasi olahraga yakni kemampuan federasi internasional untuk menetapkan aturan internal, mengatur hubungan hukum antara pemain dan klub, serta menyelesaikan sengketa secara internal melalui Dispute Resolution Chamber (DRC) atau Players' Status Committee (PSC). Prinsip ini didukung oleh doktrin *lex sportiva* sebagaimana dijelaskan oleh (Foster, 2011) dan (Mitten & Opie, 2010), yang menganggap hukum olahraga sebagai subsistem hukum internasional non-negara dengan legitimasi yang bersumber dari penerimaan global. Meskipun demikian,

otonomi ini tidak bersifat mutlak karena tetap berhadapan dengan batasan hukum publik nasional dan supranasional, seperti hukum ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta hukum persaingan. Kasus terkenal *Bosman v. UEFA* (CJEU, 1995) menegaskan bahwa regulasi transfer FIFA yang membatasi kebebasan bergerak pemain bertentangan dengan prinsip dasar Uni Eropa tentang kebebasan bekerja. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa yurisdiksi privat FIFA tunduk pada judicial oversight ketika norma internalnya melanggar ketentuan hukum publik Gardiner & Welch, (2016).

Dalam konteks penyelesaian sengketa, Court of Arbitration for Sport (CAS) memainkan peran sentral sebagai lembaga arbitrase independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan Olympic Charter dan diakui oleh berbagai federasi olahraga internasional. Yurisdiksi CAS pada umumnya bersumber dari dua bentuk dasar: pertama, statutory submission, yaitu pengalihan kewenangan secara langsung melalui ketentuan peraturan federasi (misalnya Statuta FIFA); dan kedua, contractual submission melalui klausul arbitrase yang tercantum dalam kontrak pemain atau perjanjian kerja. Dengan dua dasar tersebut, CAS memiliki legitimasi untuk memutus sengketa yang timbul dalam lingkup hukum olahraga, termasuk sengketa kontrak pemain dan sanksi disipliner. Hal ini sejalan dengan pandangan (Kaufmann-Kohler, 2001), yang menyebut CAS sebagai apex of the lex sportiva, karena berperan tidak hanya sebagai pengadilan arbitrase tetapi juga sebagai pembentuk prinsip-prinsip hukum olahraga internasional melalui jurisprudence constante.

Namun demikian, yurisdiksi CAS juga menghadapi batasan signifikan. Meskipun CAS bersifat final dan mengikat dalam ranah olahraga, keputusan-keputusannya dapat diajukan set-aside application ke Mahkamah Federal Swiss berdasarkan Pasal 190 Swiss Private International Law Act. Yurisprudensi Swiss menegaskan bahwa intervensi pengadilan nasional terhadap putusan CAS sangat terbatas, hanya diperbolehkan pada kondisi pelanggaran mendasar terhadap public policy atau hak-hak prosedural pihak yang bersengketa. Dalam konteks Uni Eropa, yurisdiksi CAS juga menghadapi pengawasan oleh Court of Justice of the European Union (CJEU) ketika aturan olahraga bertentangan dengan hukum pasar tunggal Eropa, seperti dalam perkara *Meca-Medina v. Commission* (2006) yang menegaskan bahwa peraturan olahraga tetap harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi dalam hukum Uni Eropa.

Secara konseptual, dasar yurisdiksi FIFA dan CAS merupakan kombinasi antara norma privat (kontrak, peraturan internal federasi) dan norma publik (pengakuan pengadilan nasional serta hukum internasional). Model dualisme normatif ini menciptakan apa yang disebut Latty (2011) sebagai hybrid legal order, di mana hukum olahraga beroperasi dalam ruang antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam praktiknya, ketika timbul sengketa kontrak misalnya pemutusan kontrak tanpa just cause, pelanggaran kewajiban gaji, atau pelanggaran transfer para pihak wajib terlebih dahulu mengajukan penyelesaian ke badan internal FIFA seperti DRC. Putusan DRC dapat diajukan banding ke CAS, dan hasilnya memiliki kekuatan final dalam sistem olahraga Nugroho et al., (2023). Namun, dalam keadaan tertentu seperti penegakan award atau permohonan pembatalan, para pihak dapat melibatkan pengadilan nasional untuk menegakkan atau menguji legalitas putusan arbitrase tersebut, sebagaimana

diatur dalam New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).

Dari perspektif teori hukum, legitimasi yurisdiksi FIFA dan CAS sering dijustifikasi melalui prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan kebutuhan akan uniformitas global dalam regulasi olahraga. Menurut (Casini, 2011), sistem arbitrase olahraga internasional berperan penting dalam menjaga stabilitas dan integrasi transnasional dunia sepak bola. Namun, sejumlah akademisi seperti (Lindholm, 2019) dan Blackshaw (2010) mengkritik bahwa sistem ini kurang memberikan ruang bagi prinsip *due process*, *transparency*, dan *accountability*, terutama ketika keputusan FIFA/CAS berdampak langsung terhadap hak-hak fundamental pemain seperti kebebasan bekerja atau hak atas gaji yang adil. Kritik ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara *autonomy of sport* dan *rule of law* dalam struktur yurisdiksi olahraga internasional.

Konflik ini terlihat secara konkret dalam perkara Bosman (CJEU, 1995), titik balik besar dalam sejarah hukum olahraga. Aturan FIFA/UEFA yang pada saat itu mengharuskan kompensasi transfer meskipun kontrak pemain telah berakhir dinyatakan bertentangan dengan *freedom of movement* dalam Pasal 45 Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Putusan ini membuka fakta bahwa *lex sportiva* tidak dapat meniadakan posisi pemain sebagai pekerja yang dilindungi hukum ketenagakerjaan. Pada ranah berbeda, kasus *Matuzalem v. FIFA* menunjukkan bagaimana sanksi yang diberikan FIFA atas kegagalan pembayaran kompensasi dianggap sah secara internal, tetapi dinilai melanggar martabat manusia dan kemampuan pemain untuk mencari nafkah oleh Mahkamah Federal Swiss. Pengadilan menilai sanksi FIFA bersifat “ekonomik mematikan”, sehingga menyalahi prinsip HAM yang dijamin oleh Swiss Constitution dan ECHR. Kedua kasus tersebut memperkaya pemahaman bahwa kewenangan FIFA bukanlah yurisdiksi absolut, melainkan dapat dibatasi apabila bertentangan dengan nilai fundamental hukum publik.

Oleh karena itu, penguatan sistem yurisdiksi FIFA/CAS idealnya diarahkan pada pembentukan mekanisme kontrol yang lebih transparan, aksesibilitas bagi pemain dengan posisi tawar rendah, serta harmonisasi antara *lex sportiva* dan hukum publik nasional. Pendekatan dialogic model antara hukum olahraga dan sistem hukum nasional sebagaimana diusulkan Nafziger (2017) dianggap dapat menciptakan keseimbangan yang sehat antara otonomi olahraga dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, meskipun yurisdiksi FIFA dan CAS didasarkan pada kerangka hukum privat transnasional yang kuat, legitimasi dan keberlanjutannya tetap bergantung pada sejauh mana sistem tersebut selaras dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam konteks global.

Dari dua perkara tersebut terlihat bahwa tata kelola penyelesaian sengketa olahraga berada dalam sebuah hybrid legal order, sebuah konsep yang menggambarkan koeksistensi dan interaksi dinamis antara hukum privat transnasional dan hukum publik nasional. Dalam model ini, *lex sportiva* membentuk rezim mandiri yang berlaku melalui hubungan kontraktual antar-anggota FIFA, tetapi efektivitasnya bergantung pada legitimasi dan pengakuan oleh pengadilan nasional. Sistem hibrid ini bukan hanya struktur normatif, melainkan arena tarik-menarik kekuasaan, di mana kepentingan komersial yang diatur FIFA terkadang berbenturan dengan

perlindungan pekerja, hak ekonomi, dan prinsip HAM yang dijamin oleh negara. Karena itu, gesekan yurisdiksi bersifat inheren dan tak terhindarkan.

Sinkronisasi Yurisdiksi Yang Ideal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Sengketa Kontrak Pemain Sepakbola Internasional

Model sinkronisasi yurisdiksi ideal antara FIFA/CAS dan pengadilan nasional harus dibangun di atas prinsip komplementaritas, yaitu pengakuan terhadap *lex sportiva* sebagai sistem hukum privat transnasional yang mengatur penyelesaian sengketa teknis olahraga secara seragam, namun dengan tetap membuka ruang pengawasan terbatas oleh pengadilan nasional atau badan supranasional ketika hak fundamental atau prinsip public policy terancam. Prinsip ini bertujuan menciptakan harmoni antara efektivitas penyelesaian sengketa internal olahraga dan legitimasi hukum publik. Menurut Casini (2011), *lex sportiva* hanya dapat berfungsi secara sah apabila diakui dan diintegrasikan dalam tatanan hukum nasional maupun internasional melalui mekanisme pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) dan prosedur koordinasi antar-forum. Oleh karena itu, diperlukan kerangka formal yang menjembatani hubungan antara lembaga arbitrase olahraga dan peradilan umum guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta praktik forum shopping yang dapat mengaburkan kepastian hukum (Foster, 2011; Duval, 2018).

Pada titik ini, penting menegaskan bahwa *lex sportiva* bukanlah hukum publik dalam arti formal, tetapi rangkaian norma kontraktual yang disusun oleh federasi olahraga dan disetujui oleh para anggotanya. Ia memiliki karakter transnasional, seragam, dan mengikat secara horizontal antara pelaku olahraga. Namun demikian, kedudukan *lex sportiva* selalu lebih rendah daripada hukum nasional ketika terjadi konflik, sebab negara tetap memegang otoritas tertinggi dalam menentukan aspek ketenagakerjaan, HAM, dan perlindungan warganya. Dengan demikian, sekalipun *lex sportiva* secara praktis sering ditempatkan setara dengan hukum negara karena berlaku luas lintas yurisdiksi, posisi itu tidak bersifat hierarkis melainkan fungsional. Setiap negara berhak membatasi penerapannya jika bertentangan dengan konstitusi, undang-undang ketenagakerjaan, atau prinsip *ordre public*.

Secara praktis, model sinkronisasi ini dapat didesain berdasarkan tiga pilar utama. Pertama, perlu adanya *clarification of jurisdictional clauses* dalam regulasi FIFA dan kontrak pemain agar batasan *mandatory arbitration* jelas dan tidak melanggar hak konstitusional untuk memperoleh keadilan (Silva & Mirante, 2020). Penegasan klausul yurisdiksi ini dapat mengacu pada praktik internasional sebagaimana diuraikan oleh Kaufmann-Kohler (2001), yang menekankan pentingnya kejelasan perjanjian arbitrase dalam menjaga validitas forum. Kedua, penerapan mekanisme *limited judicial review* oleh pengadilan domestik terhadap putusan CAS untuk memastikan penghormatan terhadap public policy, *due process of law*, dan hak-hak asasi manusia tanpa melakukan pemeriksaan ulang (*de novo review*). Mekanisme seperti ini telah diterapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Federal Swiss berdasarkan Pasal 190 Swiss Private International Law Act, yang membatasi intervensi hanya pada pelanggaran prosedural berat atau ketidaksesuaian dengan *ordre public* (Lindholm, 2019). Ketiga, perlunya *coordination procedure* dalam keadaan darurat (*injunctive relief*), misalnya ketika keputusan FIFA/CAS dapat menimbulkan kerugian irreparabel bagi pemain atau klub. Hal ini bertujuan mencegah

konflik antar-forum dan menjaga integritas kompetisi olahraga (Latty, 2011; Mitten & Opie, 2010).

Dalam kenyataannya, tumpang tindih antara putusan FIFA/CAS dan hukum domestik sering menimbulkan persoalan praktis. Misalnya, kewajiban kompensasi dalam jumlah besar yang diputuskan DRC untuk pemain yang memutus kontrak tanpa “just cause” dapat dianggap tidak sebanding oleh pengadilan nasional karena melanggar prinsip proporsionalitas. Selain itu, aturan FIFA yang membatasi perekrutan pemain di bawah umur telah beberapa kali berhadapan dengan hukum perlindungan anak nasional, seperti dalam kasus Barcelona dan Real Madrid di Spanyol. Bahkan, penerapan larangan bermain sebagai sanksi administratif dapat bertentangan dengan hak bekerja di beberapa yurisdiksi. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa FIFA dapat saja menetapkan aturan global, tetapi penegakannya selalu bergantung pada kesesuaian dengan sistem hukum domestik.

Pendekatan sinkronisasi yang ideal juga harus mengakomodasi transparansi dan akuntabilitas yudisial di dalam CAS. Sejumlah akademisi menilai bahwa legitimasi *lex sportiva* hanya dapat diperkuat melalui pembukaan akses publik terhadap putusan arbitrase, peningkatan kualitas argumentasi hukum, dan reformasi etika arbitrator guna menjamin independensi serta imparisialitas (Blackshaw, 2010; Casini, 2011). Dengan demikian, reformasi CAS tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga menyentuh aspek normatif terkait keadilan substantif. Dalam konteks ini, Duval (2018) menegaskan perlunya perlindungan bagi pemain sebagai pihak yang umumnya berada dalam posisi tawar yang lebih lemah melalui akses terhadap mekanisme banding yang adil, transparan, dan efisien. Penguatan legitimasi CAS melalui publikasi *jurisprudence constante* juga akan membantu membangun kepastian hukum dan mengurangi kebutuhan intervensi pengadilan nasional (Latty, 2011).

Selain itu, model sinkronisasi yurisdiksi juga harus memperhitungkan konflik norma supranasional, khususnya antara regulasi FIFA dan hukum publik di kawasan seperti Uni Eropa (Podszun & Kirk, (2024). Putusan CJEU dalam perkara Bosman (1995) dan Meca-Medina (2006) membuktikan bahwa peraturan olahraga yang melanggar kebebasan bergerak atau hukum persaingan ekonomi dapat dinyatakan tidak sah. Dalam konteks ini, idealnya dibangun klausul *harmonization and consultation mechanism* antara FIFA, asosiasi regional (misalnya UEFA), serta otoritas hak asasi dan kompetisi regional untuk memastikan keselarasan antara norma privat dan hukum publik (Duval, 2018; Nafziger, 2017). Harmonisasi ini juga penting untuk mencegah konflik yurisdiksi dan menjamin agar *lex sportiva* tidak menjadi sistem hukum tertutup yang mengabaikan prinsip universal seperti non-diskriminasi dan keadilan prosedural (Casini, 2011).

Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan putusan, perlu dikembangkan *standardized enforcement framework* yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan CAS awards di berbagai yurisdiksi domestik (Kaypova, 2024). Model ini dapat diadopsi dari prinsip-prinsip New York Convention 1958 dengan modifikasi kontekstual untuk sektor olahraga, seperti pembentukan mekanisme multilateral antar-negara yang mengatur pengakuan otomatis atas *sport arbitral awards* (Lindholm, 2019). Menurut Latty (2011), adaptasi konvensi ini akan mengurangi hambatan administratif dan perbedaan interpretasi

nasional yang selama ini menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi keputusan arbitrase olahraga.

Terakhir, model sinkronisasi ideal juga harus memastikan akses terhadap pemulihan hukum yang adil (*effective remedies*) bagi pemain dan klub (Krupaliya et al., 2024). Hal ini mencakup mekanisme kompensasi yang objektif, prosedur banding darurat yang cepat dan terjangkau, serta jaminan *non-discrimination* dalam penerapan aturan FIFA/CAS. Reformasi RSTP perlu diarahkan untuk memasukkan ketentuan yang menegaskan hak pemain atas perlindungan hukum setara, sebagaimana disarankan oleh Nafziger (2017) dalam kerangka *global sports governance*. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa olahraga internasional tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif menyatukan kepentingan olahraga global dengan supremasi hukum publik.

Pemahaman mengenai *hybrid legal order* juga menggarisbawahi bahwa yurisdiksi FIFA dan CAS tidak dapat dianalisis secara terpisah dari konteks hukum nasional. Otonomi olahraga memang diperlukan untuk menjaga keseragaman regulasi, tetapi tanpa pengawasan negara, ia berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan yang merugikan pemain. Karena itu, harmoni antara norma transnasional dan norma publik tidak hanya berfungsi menjaga kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian sengketa olahraga tetap menghormati nilai keadilan universal. Dengan kerangka hibrida ini, relasi FIFA, CAS, dan negara dapat ditempatkan dalam keseimbangan yang tepat, sehingga otonomi olahraga tidak berkembang menjadi otoritarianisme privat.

SIMPULAN

FIFA dan CAS memiliki dasar yurisdiksi yang bersumber dari *lex sportiva* sebagai sistem hukum privat transnasional yang mengatur hubungan kontraktual antara pemain, klub, dan federasi. FIFA melalui *Dispute Resolution Chamber (DRC)* berwenang menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan dan transfer pemain, sedangkan CAS bertindak sebagai lembaga arbitrase independen yang memberikan putusan final berdasarkan asas *autonomy of sport* dan *consent of the parties*. Meskipun demikian, otonomi ini tetap dibatasi oleh prinsip hukum publik nasional dan internasional, terutama ketika terdapat pelanggaran terhadap *public policy* dan hak asasi manusia sebagaimana tampak dalam perkara *Matuzalém v. FIFA* serta *Bosman v. UEFA* yang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara otonomi olahraga dan supremasi hukum publik.

Konflik dalam perkara *Bosman* dan *Matuzalém* juga memperlihatkan bahwa *lex sportiva* tidak selalu berjalan seiring dengan hukum nasional, terutama pada isu ketenagakerjaan dan perlindungan hak dasar individu. Kedua kasus tersebut membuktikan bahwa keputusan FIFA maupun CAS dapat dibatasi, dikoreksi, bahkan dibatalkan oleh pengadilan nasional apabila dianggap melanggar asas fundamental negara. Dengan demikian, penyelesaian sengketa olahraga internasional bekerja dalam suatu *hybrid legal order*, yaitu tatanan hukum hibrida di mana norma privat transnasional dan hukum nasional saling berinteraksi, berbenturan, dan saling mengoreksi. Model hibrid ini menegaskan bahwa otonomi olahraga tidak bersifat absolut, dan keberlakuan *lex sportiva* sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip

ketertiban umum, HAM, serta kerangka hukum nasional negara tempat putusan itu harus ditegakkan.

Konflik yurisdiksi antara FIFA/CAS dan pengadilan nasional menegaskan perlunya sinkronisasi sistem hukum agar tercipta kejelasan kewenangan dan kepastian hukum bagi para pihak. Model sinkronisasi ideal dibangun atas prinsip komplementaritas, yakni pengakuan terhadap *lex sportiva* sebagai sistem penyelesaian sengketa utama namun tetap memberi ruang kontrol terbatas oleh pengadilan nasional untuk menjamin keadilan prosedural dan *due process of law*. Dengan pendekatan ini, mekanisme arbitrase olahraga dapat berfungsi efektif tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional dan asas keadilan universal dalam sistem hukum internasional.

Selain itu, reformasi CAS perlu diarahkan pada transparansi, independensi arbitrator, serta peningkatan akses keadilan bagi pemain yang lemah secara ekonomi agar legitimasi lembaga arbitrase semakin kuat. Penguatan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan prinsip New York Convention 1958 juga diperlukan guna memastikan konsistensi penerapan di berbagai yurisdiksi. Dengan demikian, harmonisasi antara *lex sportiva*, hukum nasional, dan hukum internasional publik menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa sepak bola internasional yang adil, transparan, dan selaras dengan prinsip *rule of law* dalam tata hukum global modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackshaw, I. S. (2017). *International sports law: An introductory guide*. TMC Asser Press.
- Casini, L. (2011). The making of a *lex sportiva* by the Court of Arbitration for Sport. *German Law Journal*, 12(5), 1317–1340. <https://doi.org/10.1017/S2071832200017326>
- Court of Arbitration for Sport. (2023). *Code of sports-related arbitration*. International Council of Arbitration for Sport.
- Duval, A. (2018). The Olympic Charter: A transnational constitution without a state? *Journal of Law and Society*, 45(S1), S245–S269. <https://doi.org/10.1111/jols.12112>
- Fédération Internationale de Football Association. (2020). *FIFA statutes*. FIFA Legal Handbook.
- Fédération Internationale de Football Association. (2022). *Regulations on the status and transfer of players (RSTP)*.
- Flanagan, C. A. (2018). The corridor of uncertainty: Part two, why attempts to regulate the financial aspects of football are met with legal challenges. *The International Sports Law Journal*. <https://doi.org/10.1007/s40318-018-0125-z>
- Foster, K. (2011). *Lex sportiva: Transnational law in action*. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1803472>
- Gardiner, S., & Welch, R. (2016). Nationality-based playing quotas and the international transfer system post-Bosman. *The International Sports Law Journal*.
- Ghorbani Asiabar, M., Ghorbani Asiabar, M., & Ghorbani Asiabar, A. (2025). Legal challenges of player transfer contracts in professional sports: Focusing on emerging conditions in the global sports market. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202505.1566.v2>
- Kaufmann-Kohler, G. (2001). Arbitration and the need for technical or scientific expertise. In Permanent Court of Arbitration (Ed.), *Arbitration in air, space and telecommunications law – Enforcing regulatory measures* (pp. 285–296). Kluwer Law International.

- Kaypova, M. B. (2024). Recognition and enforcement of international arbitration awards. *International Journal of Law and Criminology*.
- Krupalija, E., Trbić, T., Cogo, E., & Pozderac, D. (2024). Information system for the management of football player legal disputes by sports law professionals. *Journal of Sports Law and Technology*.
- Latty, F. (2011). *La lex sportiva: Recherche sur le droit transnational*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Lindholm, J. (2019). *The Court of Arbitration for Sport and its jurisprudence: An empirical inquiry into lex sportiva*. TMC Asser Press. <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-285-9>
- Longa, F. A. (2025). Legal dimensions of alternative dispute resolution in sports law: Mechanisms, advantages, and challenges. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202507.1119.v1>
- Mitten, M. J., & Opie, H. (2010). *Sports law: Implications for the development of international, comparative, and national law and global dispute resolution*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=1625919>
- Nafziger, J. A., & Ross, S. F. (Eds.). (2011). *Handbook on international sports law*. Edward Elgar.
- Nugroho, A., Sulistyowati, E., Rusdiana, E., Masnun, M. A., Wahyudi, E., Huzaimi, R. W., & Ikram, D. (2023). Dispute resolution between players and clubs after the enactment of Law Number 11 Year 2022 concerning sports. *Technium Social Sciences Journal*.
- Podszun, R., & Kirk, A. P. (2024). FIFA's football agent regulations and European competition law. *Journal of Antitrust Enforcement*.
- Silva, A. F. da, & Mirante, D. (2020). Mandatory arbitration as a possible future for sports arbitration: The Portuguese example. *The International Sports Law Journal*.
- Yilmaz, S. (2018). Protection of minors: Lessons about the FIFA RSTP from recent Spanish cases at the Court of Arbitration for Sport. *The International Sports Law Journal*.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).